

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*.  
Malang: Bayumedia Publishing.
- Aan Efendi dan Freddy Poernomo, 2019. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar  
Grafika.
- Abdul Latief, 2016. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*.  
Jakarta: Prenada Media Grup.
- Aminuddin Ilmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Premadamedia Grup.
- Aria Zurnetti, Nani Mulyati, dan Felia Hermayeti, 2021. *Pencegahan Tindak  
Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat Studi  
Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A.Z. Abidin, 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Bambang Sugianto dan Evi Purnamawati, 2022. *Hukum Administrasi Negara  
Dalam Kajian Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: DeepPublisher.
- Dijan Widijowati dan Halim Darmawan, 2022. *Pembaharuan Hukum Pidana  
Pada Tindak Pidana Korupsi*. Malang: CV Literasi Nusantara.
- Edita Elda, 2021. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
Persada.
- Elwi Danil, 2011. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*.  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eri Yulikhsan, 2016, *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*, Sleman: Deepublish.

Ikhwan Fahrojih, 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Jatim: Setara Press.

Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.

Irsan Arief, 2022. *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2019. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

KIF Aminanto, 2017, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Kata Media.

Kristiawanto, 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.

Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico.

Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Monang Siahaan, 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Philipus M. Hadjon, 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*.  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ratih Pratiwi, Hasan, dkk, 2024. *Metodologi Penelitian*. Malang: PT Literasi  
Nusantara Abadi Grup.

Ridwan HR, 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Rona Indara, 2024. *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan  
Kerugian Negara*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi.

Topo Santoso, 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Yulius, Agus Budi, 2019, *Diskresi Pemerintah Dalam Dimensi Hukum (Suatu  
Kajian Normatif, Praktis, Teoritis, dan Filosofis)*, Lampung:  
Anugrah Utama Raharja.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana  
(KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg.

Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pdg.

Putusan Nomor 5/P/PW/2018/PTUN.BKL.

Putusan Nomor 2/P/PW/2017/PTUN.JBI.

## **JURNAL**

Aini Suniaprily, Erika Nur Vardani, dan M Aziz, 2024. *Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Pejabat Ditinjau Dari Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Fakta Hukum. Vol. 3, No. 2.

Alya Maya, Kresnha Adhy W, 2021. *Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4, No. 3.

- Amelia Putri Rizkyta, Bunga Restu Ningsih, 2022. *Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Esensi Hukum. Vol. 4 No. 2.
- Baharuddin Badaru, 2023. *Kepentingan Umum dalam Asas Oportunitas pada Sistem Peradilan Pidana*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No. 2.
- Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, 2024. *Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Fakultas Hukum Universitas Galuh: Jurnal Ilmiah Galuh Justisia. Vol. 12 No.2.
- Dimas Purnama Putra, 2020, *Diskresi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Badamai Law Journal, Vol. 5, No. 1.
- Disiplin F. Manao, 2018. *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 2, No. 1.
- Edy Basuki, 2022. *Implikasi Hukum Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan. Vol. 6 No. 2.
- Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha dan Alfiansyah Fauzan, 2021. *Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi*.



JMPIS : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No 2.

Gunawan Simangunsong, 2021. *Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara: Sebuah Analisis*. DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 1 No. 4.

Ismail, 2018. *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol.2, No.2.

Muhammad Anshori Sudirman dan Amiruddin Lalu Parman, 2020. *Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Pagaruyung Law Journal. Volume 3 No. 2.

Mohammad Sahlan, 2016. *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol 2.

Nila Amania, 2016, *Kewenangan Penghitungan Kerugian Negara Dalam Kasus Tipikor*, Jurnal Syariati, Vol. 2, No. 2.

Taufik Rachman, Lucky Raspati, 2021. *Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tipikor*. Jurnal Nagari Law Review. Vol. 4, No. 2.

## **DISERTASI, TESIS, SKRIPSI**

Aliansyah, 2022. *Implikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepastian Hukum Tipikor*.  
Disertasi: Universitas Andalas.

Boy Yendra Tamin, 2017. *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkup Tugas Dan Kewenangan Administratif*. Disertasi: Universitas Andalas.

Bram Mohammad Yasser, 2018. *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi: Universitas Andalas.

Wahyu Agam, 2019. *Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.

## **DOKUMEN LAIN**

BPK, 2008. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah*.

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2021*. Jakarta Selatan.

\_\_\_\_\_, 2023. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2022*. Jakarta Selatan.

\_\_\_\_\_, 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta Selatan.



Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : KPK.

**WEBSITE:**

Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022. <https://aclc.kpk.go.id/> diakses pada 12 Agustus 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 24 Mei 2025 pukul 21.00 WIB.

